

JAWABAN TUGAS 1

Rhiza S. Sadjad
NIM 045276176

Fakultas : FHISIP/Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Kode>Nama MK : **SOSI4304.5/Teori dan Metode Intervensi Sosial 5**
Tugas : 1

Pertanyaan 1/3:

Dalam modul 1 Pokok Bahasan 1 dipaparkan tinjauan tentang Pengertian dan Landasan Filosofis Intervensi Sosial. Coba jelaskan bagaimana keterkaitan landasan filosofis intervensi sosial dengan fungsi dan manfaat dari intervensi sosial itu sendiri

Jawaban 1/3:

Pengertian dan landasan filosofis dari INTERVENSI SOSIAL dibahas dalam referensi [1] Modul 01 hal. 1.4 – 1.26, sedangkan yang khusus terkait dengan manfaat intervensi sosial dibahas pada hal. 1.6 – 1.7. Keterkaitan antara landasan filosofis intervensi sosial dengan fungsi dan manfaat-nya dapat dijelaskan dengan merujuk ke referensi [1] mau pun referensi [2], seperti diuraikan berikut ini.

Landasan filosofis intervensi sosial terkait erat dengan tatanan nilai yang dianut oleh pelaksana intervensi (PI). Jadi fungsi dan manfaat intervensi sosial harus selalu dikembalikan ke landasan filosofisnya, artinya harus selalu berada dalam koridor tatanan nilai luhur yang dianut. Ambil contoh nyata misalnya intervensi sosial dalam bentuk pembagian BANSOS. Manfaat intervensi sosial dalam bentuk pembagian BANSOS akan dirasakan langsung oleh klien, dalam hal ini masyarakat miskin. Secara fungsional, BANSOS memang merupakan salah satu upaya untuk pengentasan kemiskinan. Tatanan nilai luhur yang terkait dengan upaya pengentasan kemiskinan adalah KEADILAN. Kata “adil” jika merujuk ke landasan filosofis bangsa, yaitu Panca Sila, ada pada sila kedua terkait dengan prinsip kemanusiaan dan sila kelima yang terkait dengan prinsip kesejahteraan sosial. Olehnya itu, ketika intervensi sosial berupa pembagian BANSOS ditanggung oleh motif lain, misalnya motif politis untuk memenangkan pemilihan, maka fungsi dan manfaatnya tidak lagi dapat dikembalikan ke landasan filosofisnya, yaitu kemanusiaan dan keadilan sosial. Makanya dalam kasus seperti ini, pembagian BANSOS itu akan terasa sebagai suatu intervensi sosial yang “salah”, atau tidak sesuai dengan “*marwah*” atau “*muruah*”-nya.

Fungsi dari intervensi sosial pada umumnya memang berakar pada prinsip-prinsip landasan filosofis-nya, seperti misalnya prinsip keadilan, persamaan dan kasih-sayang atau rasa kemanusiaan. Sebagai contoh misalnya suatu intervensi sosial yang merupakan upaya untuk mengentaskan kemiskinan (seperti BANSOS dan semacamnya), seyogyanya me-refleksi-kan komitmen pada landasan filosofis untuk menegakkan keadilan sosial dan menjaga harkat dan

martabat manusia agar dapat menghidupi dirinya dan keluarganya secara layak. Manfaat dari intervensi sosial ini, yaitu meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kesenjangan kaya dan miskin, tentu sejalan dengan tatanan nilai yang menjadi landasan filosofis intervensi sosial itu sendiri.

Pertanyaan 2/3:

*Dalam Modul 2 Pokok Bahasan 1 Fungsi Sosial Individu. Jelaskan dan Ilustrasikan pembentukan identitas individu dan fungsi sosial dirinya di dalam masyarakat dengan memilih **salah satu** tema berikut:*

- *Penyintas Covid-19 di masa pasca pandemi*
- ***Akademisi yang menyuarakan kecurangan pemilu***
- *Atlet Sepakbola yang mewakili Timnas Indonesia Piala Asia 2023 di Qatar*

Jawaban 2/3:

Fungsi sosial dari setiap individu dalam masyarakatnya, khususnya terkait pembentukan identitas dan fungsi sosial dirinya, dibahas dalam referensi [1], **Modul 02**, hal. **2.3 – 2.12**. Dalam hal ini dipilih kasus para akademisi yang ramai-ramai menyuarakan keprihatinan mereka pada proses PEMILU, khususnya PILPRES, yang dinilai penuh dengan kecurangan.

PEMILU adalah proses politik, yang merupakan ranah perhatian dari para politisi. Tapi PEMILU juga menuntut partisipasi aktif dari seluruh warga negara dewasa yang mempunyai hak-pilih, termasuk tentunya akademisi. Ada pemeo yang menyatakan: “*Seorang politisi tidak boleh salah, karena itu ia boleh berbohong. Sebaliknya akademisi boleh salah, tapi ia tidak boleh berbohong*”. Secara tidak langsung, pemeo ini menunjukkan kontras perbedaan antara dunia politik dan dunia akademik. Kecurangan dalam dunia politik - selama tidak terbukti melanggar hukum - adalah hal yang biasa, sebagaimana dalam permainan sepakbola, senggol-menyenggol dengan sesama pemain, dianggap biasa, paling konsekuensi-nya mendapat kartu kuning atau bahkan kartu merah. Oleh karena itu, suatu hal yang dianggap biasa oleh para politisi di dunia politik, bisa jadi menjadi hal yang mem-prihatin-kan dilihat dengan kaca mata akademik oleh para akademisi, terutama jika sudah dianggap terjadi kecurangan yang TSM (Ter-struktur, Sistemik dan Masif)..

Merujuk ke referensi [2], untuk menjelaskan pembentukan identitas dan fungsi sosial seorang akademisi, maka bisa diambil kontras antara identitas dan fungsi sosial politisi dan akademisi, walau pun antara keduanya bisa saja terjadi tumpang-tindih fungsi sosial, misalnya akademisi yang ber-kontribusi dengan kepakarannya dalam penetapan kebijakan pemerintah, atau politisi yang mengajar sebagai gurubesar di perguruan-tinggi, atau berpartisipasi dalam penelitian ilmiah. Banyak pula tokoh yang memiliki identitas “ganda”, kadang berperan sebagai politisi, kadang berlaku sebagai akademisi, tergantung mana yang dianggap “menguntungkan” pada suatu saat tertentu.

Setidaknya ada 4 (empat) hal yang membedakan fungsi sosial dan identitas akademisi dari politisi, yaitu: (1) Peran dan tanggungjawabnya di masyarakat, (2) Kepakaran dan pengetahuan, (3) Sasaran dan tujuan, serta (4) Akuntabilitas publik. Lebih jauh keempat hal tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. **Peran dan tanggungjawab.** Akademisi umumnya bekerja sebagai pakar, peneliti dan pengajar di lembaga-lembaga akademik seperti lembaga penelitian dan perguruan tinggi, sedangkan politisi – baik yang terpilih dalam pemilihan, atau yang diangkat dalam pemerintahan – bekerja mewakili dan untuk konstituennya, membuat berbagai regulasi dan kebijakan, serta menjalankan birokrasi dan administrasi pemerintahan. Akademisi bekerja menghasilkan karya ilmiah hasil penelitiannya, serta menghasilkan alumni yang diajar dan dibimbingnya, dan utamanya harus senantiasa ber-kontribusi pada pengembangan ilmu di bidangnya. Berbeda dengan politisi, yang tanggungjawab utamanya adalah membuat regulasi, menjalankan roda pemerintahan dengan administrasi publik dan birokrasi.
2. **Kepakaran dan pengetahuan.** Politisi umumnya menguasai kepakaran dalam bidang administrasi dan kebijakan publik, hukum administrasi negara, diplomasi dan ilmu pemerintahan. Mereka umumnya memiliki pemahaman yang luas tentang sistem sosial, ekonomi dan politik secara umum, serta memiliki ketrampilan dalam ber-negosiasi, mempengaruhi massa, ber-diskusi, berdebat dan berpidato (*public-speaking*). Sedangkan akademisi terikat dengan disiplin ilmu-nya masing-masing, mereka memiliki pengetahuan yang mendalam dalam bidangnya, baik ilmu-pengetahuan dan teknologi, ilmu sosial, humaniora mau pun berbagai bidang lain, termasuk ilmu hukum, ilmu politik, ilmu sosial-budaya dan ilmu ekonomi. Kedalaman pengetahuan dari para akademisi diperoleh melalui pendidikan, pengalaman riset dan studi berpuluh-tahun dalam bidangnya masing-masing. Tidak mungkin kedalaman pengetahuan ini diperoleh secara instan oleh seorang akademisi. Di sini juga bedanya dengan para politisi, yang bisa saja tiba-tiba menjadi Ketua Umum Partai, atau tiba-tiba didaftarkan sebagai Cawapres, lalu menang PEMILU, dan seterusnya.
3. **Sasaran dan tujuan.** Politisi umumnya bekerja dari PEMILU ke PEMILU. Tujuannya adalah terpilih dalam pemilihan, atau terangkat dalam jabatan publik. Untuk tujuan itu sasaran utamanya adalah bagaimana mempengaruhi konstituen agar memilih beliaunya. Para politisi bekerja dalam ranah eksekutif di pemerintahan, atau dalam ranah legislatif di parlemen. Mereka membuat regulasi, peraturan, undang-undang, kebijakan publik, dan seterusnya demi kepentingan publik secara umum. Sedangkan akademisi bekerja dengan tujuan untuk mengembangkan ilmu dan mencerdaskan kehidupan bangsa, melalui berbagai kegiatan riset, pengajaran dan publikasi. Sasarannya adalah ber-kontribusi dalam dunia

akademik, membimbing mahasiswa, serta bekerja-sama dengan sesama akademisi untuk menghasilkan berbagai karya ilmu-pengetahuan dan teknologi.

4. **Akuntabilitas publik.** Seorang politisi – apalagi yang bekerja sebagai pejabat publik – akuntabilitasnya terhadap publik (terutama konstituen pemilihnya) bersifat langsung. Jika seorang politisi dianggap tidak menunjukkan kinerja yang baik (tidak “*perform*”) maka dalam PEMILU berikutnya tidak akan terpilih lagi. Sedangkan akademisi tidak menghadapi akuntabilitas publik secara langsung. Mereka akuntabel terhadap komunitas disiplin ilmunya, pada rekan-rekan sejawat dan se-profesi dalam asosiasi, serta pada lembaga tempat mereka bekerja. Tidak ada akuntabilitas publik secara langsung dari para akademisi.

Mengingat kontras perbedaan antara fungsi sosial dan identitas politisi dengan akademisi, maka fenomena adanya suara “keras” dari komunitas para akademisi terkait pelaksanaan dan proses PEMILU yang mereka lihat penuh dengan kecurangan, terasa agak “janggal”. Mengapa PEMILU yang biasanya hanya menjadi ranah perhatian kaum politisi, kali ini juga mendapat perhatian yang serius dari kaum akademisi. Tentu hal ini menimbulkan berbagai pertanyaan, dugaan dan spekulasi, **ada apa dengan demokrasi kita???**

Pertanyaan 3/3:

Dalam Modul 3 dijelaskan tentang masalah sosial yang dapat di-interpretasi beda antara Pelaku Intervensi dengan Klien. Jelaskan contoh perbedaan interpretasi terhadap masalah sosial yang dihadapi antara PI dan Kliennya.

Jawaban 3/3:

Menurut referensi [2] perbedaan penafsiran (interpretasi) terhadap suatu masalah sosial di antara PI dan klien-nya dapat menjurus menjadi kesalah-pahaman yang sangat mengganggu proses intervensi sosial yang dilaksanakan, sehingga sasaran atau tujuan yang diinginkan tidak tercapai. Untuk itu diperlukan komunikasi yang efektif di antara kedua belah pihak, serta terbangunnya saling pengertian dan kesepemahaman di antara PI dan klien mereka, merupakan kunci keberhasilan suatu intervensi sosial. Beberapa contoh perbedaan interpretasi di antara PI dan klien, misalnya yang terkait dengan antara lain:

1. **Kemiskinan.** PI mungkin melihat kemiskinan sebagai akibat sistemik dari kondisi sulitnya akses pada lapangan pekerjaan, pendidikan, pelatihan dan peningkatan kapasitas (*capacity building*), sedangkan klien melihatnya hanya sebagai nasib-peruntungan yang kurang mujur, atau karena kegagalan hidup.
2. **Kesehatan Mental.** PI menafsirkan kondisi kesehatan mental sebagai akibat dari lingkungan yang menekan atau tidak kondusif, sedangkan klien atau keluarganya mungkin

menganggapnya sebagai kelemahan pribadi atau penyakit menurun yang merupakan aib keluarga.

3. **Perundungan.** PI melihat pelaku perundungan sebagai orang dengan gangguan jiwa (ODGJ), tapi pelaku sendiri mungkin hanya menganggapnya sebagai perbuatan “iseng”, atau untuk sekedar senda-gurau atau “becanda”.
4. **Dinamika Keluarga.** PI mengamati bahwa terjadinya disfungsi dalam keluarga merupakan sumber masalah, sementara para anggota keluarga sendiri menganggapnya sebagai dukungan untuk menyelesaikan masalah mereka.
5. **Kekerasan dalam Rumah-Tangga (KDRT).** PI menengarai terjadinya KDRT sebagai akibat dari pola hubungan antara suami-isteri dan anggota keluarga lainnya yang kurang harmonis, sementara anggota keluarga sendiri menganggapnya sebagai pertengkaran-pertengkaran kecil yang biasa.

REFERENSI

- [1] **Boediman Hardjomarsono, et.al.**, “*Teori dan Metode Intervensi Sosial*”, Modul 1 – 9, SOSI4304, Edisi 3 [Agustus 2023], Penerbit Universitas Terbuka, Jakarta
- [2] **ChatGPT**, Aplikasi *Chatting* berbasis AI, dalam Sistem Operasi Android.